

ABSTRAK

AGUNG DAENG RIZKY, NIM: 105251105622 " *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penimbangan Ikan Di Tpi Paotere Kota Makassar*". Pembimbing Muhammad Ridwan dan Mega Mustika.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang berperan penting dalam distribusi hasil perikanan. Salah satu tahapan krusial dalam transaksi jual beli ikan di TPI adalah mekanisme penimbangan, karena hasil penimbangan menjadi dasar penentuan harga dan nilai transaksi antara nelayan dan pedagang. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penggunaan timbangan manual, minimnya pengawasan, serta kurangnya keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Kondisi ini perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan di TPI Paotere Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan nelayan, pedagang, dan petugas timbangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas penimbangan ikan di TPI Paotere.

Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere masih dilakukan secara manual dan digital dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagaimana dituntut dalam hukum ekonomi syariah. Proses penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan serta kondisi alat dan lingkungan penimbangan membuka peluang terjadinya ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik tersebut mengandung unsur gharar dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan ('adl) dan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagaimana tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme penimbangan melalui peningkatan pengawasan, transparansi, serta penerapan standar penimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penimbangan Ikan, TPI Paotere, Keadilan, Transparansi.